



GOVERNOR LAMPUNG

**GOVERNOR LAMPUNG
NUMBER: G/242/B.03/HK/2026**

ABOUT

**CHANGE OF GOVERNOR LAMPUNG NUMBER:
G/898/B.03/HK/2025 ABOUT PROGRAM FORMATION OF
GOVERNOR LAMPUNG YEAR 2026**

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, perlu disusun perencanaan program penyusunan Peraturan Kepala Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/898/B.03/HK/2025 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2026;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, perubahan dimaksud karena adanya usulan Rancangan Peraturan Gubernur yang urgensi dan belum masuk dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/898/B.03/HK/2025, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/898/B.03/HK/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Lampung Tahun 2026
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/898/B.03/HK/2025 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2026**
- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/898/B.03/HK/2025 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/898/B.03/HK/2025 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 5 - 2026

GUBERNUR LAMPUNG,

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd



YUDHI ALFADRI, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/242/B.03/HK/2026
 TANGGAL : 4 - 5 - 2026

**PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 TAHUN 2026**

NO	INSTANSI PENGUSUL	JUDUL PERGUB	MATERI POKOK/DASAR PENYUSUNAN RAPERGUB
I.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Pelarangan Pengeluaran Ayam Hidup dari Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.
		2. Pelarangan Pengeluaran Sapi Betina Produktif dan Bobot Sapi Bakalan yang Boleh Keluar Provinsi Lampung	Tindaklanjut Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
		3. Optimalisasi Integrasi Kebun Kepala Sawit dan Peternakan Sapi Dalam Upaya Mendukung Peningkatan Populasi Ternak di Provinsi Lampung	Tindaklanjut Menteri Pertanian Nomor 105/Permentan/PD.300/8/2014 tentang Integritas Usaha Perkebunan Kepala Sawit-Sapi Dengan Usaha Perkebunan Kepala Sawit Agar melakukan Diversifikasi dengan Usaha Budidaya Sapi Potong.
II.	Biro Organisasi	1. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah	Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
		2. Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Menteri PANRB Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah
		3. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara	Tindaklanjut Keputusan Mendagri 900-4700 Tahun 2020 tentang Tatacara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah
		4. Manajemen Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Lampung	Tindaklanjut PermenPAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis
		5. Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025-2029	Tindaklanjut Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024.
III.	Rumah Sakit Jiwa	1. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2024 tentang Sumber Daya Manusia dan Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Jiwa Daerah	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

		2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
		3. Perubahan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
IV.	Badan Pendapatan Daerah	Perubahan Tarif Retribusi Daerah Pada Beberapa Perangkat Daerah	Tindaklanjut Usulan Perangkat Daerah yaitu: a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; b. Badan Penghubung; c. BPSDM; d. Dinas Kesehatan; e. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; f. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; h. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi; i. Dinas Perhubungan; j. Dinas Koperasi dan UMKM; k. Dinas Kehutanan; l. Dinas Pemuda dan Olahraga; dan m. Biro Umum.
V.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Tarif Layanan 23 (Dua Puluh Tiga) Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
		2. Revisi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 tentang Sumber Daya Manusia dan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
		3. Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Tindaklanjut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
VI.	Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek	1. Tarif Layanan Kesehatan pada RSUDAM	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
		2. Sistem Remunerasi pada RSUDAM	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

VII.	Dinas Perhubungan	1. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum di Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
		2. Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Lain di Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan
		3. Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas	- Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Alat Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Tindaklanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
		4. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2017 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		5. Penyelenggaraan Buffer Zone Gayam untuk Parkir Zonasi E Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni	Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Jalan
		6. Penyelenggaraan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung	- Tindaklanjut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan - Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengalihan Tugas dan Fungsi di Bidang Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
		7. Peraturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan Serta Angkutan Over Dimensi Over Loading (ODOL)	Tindaklanjut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan
		8. Perlintasan Peti Kemas di Provinsi Lampung	Tindaklanjut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan
VIII.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Standar Satuan Harga	Tindaklanjut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional

IX.	Badan Kepegawaian Daerah	Pola Karier Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Tindaklanjut Permenpanrb Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil.
X.	Bappeda	1. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2025-2029	Tindaklanjut: - Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan - Keputusan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor: Kep.69/M.PPN/HK/08/2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian RAD TPB/SDGs.
		2. Peta Jalan (Roadmap) Rencana Aksi Pembangunan Kependudukan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029	Tindaklanjut: - Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan - Dokumen Panduan Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029 Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
XI.	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Pedoman dan Standar Pembanguna dan Preservasi Jalan Provinsi	Tindaklanjut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan.
XII.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Desain Olahraga Daerah Tahun 2026-2030	Tindaklanjut Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah (DOD).
XIII.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029	Tindaklanjut PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
XIV.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan	Tindaklanjut Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 73/Permentan/OT.140/7/2013.
		2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Pangan dan Gizi Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
XV.	Biro Perekonomian	Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah	Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YUDHI ALFADRI, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL